

**18 TERSANGKA KASUS KORUPSI
MINYAK MENTAH PERTAMINA:**

- Riva Siahaan (RS) – Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- Sani Dinar Saifuddin (SDS) – Direktur Feedstock & Product Optimization PT KPI
- Yoki Firnandi (YF) – Dirut PT Pertamina International Shipping
- Agus Purwono (AP) – VP Feedstock Management PT KPI
- Maya Kusmaya (MK) – Direktur Pemasaran Pusat & Niaga PT PPN
- Edward Corne (EC) – VP Trading Operations PT PPN
- Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) – BO PT Navigator Khatulistiwa
- Dimas Werhaspati (DW) – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & PT Jenggala Maritim
- Gading Ramadhan Joedo (GRJ) – Komisaris PT Jenggala Maritim, Dirut PT Orbit Terminal Merak
- Alfian Nasution (AN) – VP Suplai & Distribusi Pertamina (2011–2015)
- Hanung Budya Yuktanta (HBV) – Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina (2014)
- Toto Nugroho (TN) – VP Integrated Supply Chain Pertamina (2017–2018)
- Dwi Sudarsono (DS) – VP Crude & Product Trading ISC Pertamina (2019–2020)
- Arief Sukmara (AS) – Direktur Gas Petrochemical & New Business PT PIS
- Hasto Wibowo (HW) – Supervisor ISC Pertamina (2018–2020)
- Martin Haendra (MH) – Business Development Manager PT Travikura (2019–2021)
- Indra Putra (IP) – Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi
- Muhammad Riza Chalid (MRC) – BO PT Tangki Merak & PT Orbit Terminal Merak

RIZA CHALID

JADI SOROTAN

**DPO****kasus korupsi migas 2018–2023,**

Nama Muhammad Riza Chalid, yang selama ini kerap disebut-sebut terkait praktik mafia migas, kembali menjadi sorotan. Bahkan ada yang menduga dia terlibat dalam mendanai dan mengatur kerusuhan yang belakangan terjadi di negeri ini. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat ditanya mengenai andil Riza Chalid dalam kericuhan aksi massa hingga terjadi pembakaran dan penjarahan menyatakan bahwa Polri bergerak sesuai bukti-bukti yang dikumpulkan di lapangan. Namun, dalam keterangan yang disampaikan setelah mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota polisi yang terluka saat pengamanan aksi massa dan menjalani perawatan di RS Polri Senin (1/9/2025), Kapolri tidak membeberkan adanya keterlibatan Riza Chalid. Sebelumnya dan di lokasi yang sama Presiden Prabowo menandakan bahwa dia akan menghadapi mafia-mafia sekuat apapun mafia itu. Keberanian Presiden Prabowo ini mendapat dukungan dari masyarakat termasuk dari menteri-menteri dalam kabinetnya. Dukungan itu dituangkan dalam akun media sosial (medsos) mereka. Di satu sisi, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi memasukkan Riza Chalid yang merupakan tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah 2018–2023 ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Agustus 2025 lalu. Adapun, penetapan DPO ini dilakukan lantaran yang bersangkutan tak kunjung datang setelah dipanggil Kejagung lebih dari 3 kali. Belakangan ini muncul dugaan kalau Riza Chalid berada di Malaysia.

PRABOWO KEMBALI UNDANG PARA TOKOH BAHAS ISU KEBANGSAAN

Presiden RI, Prabowo Subianto, kembali mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan sejumlah pimpinan partai politik ke Istana Kepresidenan RI, Senin (1/9/2025). Presiden Prabowo ingin berdialog dan berdiskusi mengenai isu-isu kebangsaan, terutama yang menyangkut aksi massa pada pekan lalu.

Sejak pukul 14.00 WIB, para undangan sudah mulai tiba di Istana Kepresidenan RI. Diantara tokoh yang hadir yaitu perwakilan dari tokoh agama Buddha, Bhante Kamsai Sumano Mahathera; perwakilan dari Gereja Bethel Injil Nusantara, Pendeta Johnny Lokollo; kemudian juga terlihat Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa.

Selain itu juga ada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU), Yahya Cholil Staquf; Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf; dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Addin Jauharudin.

Tokoh lain yang juga diundang yaitu Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva; Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Al Muzzammil Yusuf; Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar; Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni; Ketua Umum DPP Partai Gelora, Anis Matta; Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia; dan ada juga Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Dilansir dari antara, di antara mereka ada yang mendapatkan undangan sejak Minggu (31/8/2025) malam. Namu, ada juga yang baru dihubungi Senin (1/9/2025) pagi. Pertemuan itu dijadwalkan setelah Presiden menjenguk sejumlah korban di RS Polri, Jakarta Timur.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pertemuan antara tokoh ormas, agama, dan partai politik dengan Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Prabowo menyampaikan situasi terkini Indonesia usai kerusuhan demo.

"Masih berlangsung dengan tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh agama semua datang, baik dari ormas Islam,

Kristen, Hindu, Buddha semua tadi, lagi anu, Presiden menyampaikan perkembangan terakhir seperti yang sudah disampaikan," ujar Zulhas di Istana, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam dilansir Kompas.

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa Prabowo mendapatkan dukungan yang begitu luas hingga detik ini. Menurutnya, semua pihak mendukung Prabowo menertibkan penjarahan. "Karena itu bukan demo katanya, kalau membakar fasilitas umum, menjarah rumah warga, membakar gedung-gedung pemerintahan, membakar kantor-kantor DPRD," ucapnya.

Dia menegaskan bahwa semua ulama menyebut apa yang terjadi sudah bukan demo lagi, melainkan perusakan. "Semua ulama, tokoh-tokoh agama mengatakan itu bukan demo, tapi itu merusak. Oleh karena itu mereka meminta pemerintah menertibkan," imbuh Zulhas.

Sebelumnya, Gus Yahya, sapaan populer Ketum PBNU, menjelaskan dia diundang bersama sejumlah ormas, yang bukan hanya ormas Islam. "2 hari lalu kan 16 ormas Islam menghadap (Presiden) di Hambalang. Hari ini kemudian diundang semua ormas baik muslim maupun non-muslim, (pertemuan untuk) berkoordinasi menyampaikan, ya menyempurnakan penyampaian aspirasi masyarakat seperti yang kami lakukan kemarin, dan bagaimana juga berkoordinasi, bahu-membahu mengatasi keadaan, memulihkan keadaan," kata Gus Yahya.

Sementara itu, Muhaimin mengaku dirinya belum mengetahui agenda pertemuan ini dengan siapa saja, "Hari ini, kita diundang belum tahu dengan siapa saja, tetapi tiada lain untuk terus melakukan upaya-upaya Pak Prabowo dan seluruh pemerintahan ini harus sukses," katanya.

Dia melanjutkan, jika ada upaya-upaya, gangguan-gangguan hendaknya itu menjadi cobaan yang terus dihadapi dengan cepat, diatasi dengan baik, dan buat PKB tidak ada jalan lain, selain Presiden Prabowo



Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, saat tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (1/9/2025). (Antara)

harus sukses memimpin Indonesia. Terlebih visinya sangat mendasar, yaitu ekonomi, konstitusi tegas dalam menjalankan seluruh amanah konstitusi, solusi-solusi konstitusional tentang ekonomi, tentang politik, tentang berbagai hal.

Di satu sisi, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan kenaikan pangkat luar biasa pada 43 anggota polisi yang menjadi korban saat mengamankan aksi massa. Hal itu disampaikan saat menjenguk mereka di RS Polri, Senin (1/9/2025) siang.

"Hari ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cidera. Selama ini ada 43, dan sebagian besar sudah pulang, sekarang masih 17 ada di sini," kata Presiden Prabowo.

Prabowo menceritakan sudah menengok 13 orang. Di antaranya ada yang luka berat di kepalanya, sehingga harus operasi dan mengganti tempurung kepalanya dengan titanium. Kemudian ada yang tangannya putus dan sebagainya.

"Saya mau nengok yang paling parah ginjalnya diinjak-injak sampai rusak, dia sekarang harus dicuci darah. Saya tidak tahu, tapi kalau perlu kita cari transplantasi, kalau tidak bisa diperbaiki ginjalnya sangat berat," katanya.

Dia menandakan semua petugas yang terluka dinaikkan pangkat luar biasa, karena bertugas di lapangan membela negara dan membela rakyat. "Menghadapi anasir-anasir, kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi, hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang, tapi ada ketentuannya demonstrasinya harus damai, harus sesuai undang-undang. Jadi, undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izin harus dikasih dan berhentinya jam 18.00," tandas Prabowo.

Seperti yang diketahui, aksi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta

memprotes pernyataan anggota DPR. Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di seluruh Indonesia.

Namun, aksi tersebut berakhir dengan kerusuhan. Bahkan terjadi penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Gedung DPRD Makassar dan Gedung Negara Graha di Surabaya dibakar. Sejumlah fasilitas publik juga rusak. (han,ant,ist/lut)



Menghadapi anasir-anasir, kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi, hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang, tapi ada ketentuannya demonstrasinya harus damai, harus sesuai undang-undang. Jadi, undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izin harus dikasih dan berhentinya jam 18.00,"

**PRABOWO
SUBIANTO**

Presiden RI

PAKAR : NONAKTIF, TAPI TETAP ANGGOTA DPR RI

Penonaktifan lima anggota DPR RI, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir, oleh partai mereka ternyata secara hukum tetap berstatus anggota DPR RI. Pasalnya, Sehingga mereka masih bisa menerima gaji.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan bahwa istilah nonaktif memang ada dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tetapi penggunaannya sangat spesifik. Berdasarkan Pasal 144 menyebutkan bahwa pimpinan DPR dapat menonaktifkan sementara pimpinan dan/atau anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sedang diadukan dan pengaduannya dinyatakan memenuhi syarat serta lengkap untuk diproses.

"Jadi, konteks 'nonaktif' dalam UU MD3 itu hanya berlaku pada posisi pimpinan atau anggota MKD, bukan pada anggota DPR secara umum," ujar Titi, dilansir Kompas.com Senin (1/9/2025).

Selain itu, lanjutnya, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR juga menegaskan hal serupa, yakni nonaktif hanya berlaku bagi pimpinan atau anggota MKD.

Dengan demikian, kata Titi, penonaktifan kader oleh partai politik yang sudah diumumkan baru sebatas keputusan internal. Belum sampai ke mekanisme hukum untuk mengubah status seorang anggota DPR RI.

"Ketika partai politik menyatakan menonaktifkan kadernya yang menjadi anggota DPR, hal tersebut sebenarnya masih berupa keputusan internal politik partai atau fraksi, belum mekanisme hukum yang otomatis mengubah status mereka sebagai anggota DPR," ujar Titi.

"Dari sisi hukum, mereka tetap berstatus anggota DPR sampai ada PAW. Penggantian antarwaktu bisa dilakukan setelah ada pemberhentian antarwaktu yang disampaikan pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR," sambung dia.

Lebih lanjut Titi mengatakan bahwa perubahan status anggota DPR hanya bisa terjadi melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) yang diatur dalam Pasal 239 UU MD3. Ada tiga kondisi yang menyebabkan anggota DPR berhenti antarwaktu, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Pemberhentian itu pun ada syaratnya, misalnya tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama tiga bulan tanpa keterangan, melanggar sumpah jabatan, hingga dijatuhi pidana minimal lima tahun.

"(Syarat lain) diusulkan oleh partai



Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir. ist

politik, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, melanggar larangan dalam UU MD3, diberhentikan sebagai anggota partai politik, atau menjadi anggota partai politik lain," kata Titi.

Mekanisme tersebut, lanjut Titi, dibuat agar tidak ada kursi baru di luar hasil pemilu. Selain PAW, UU MD3 juga mengatur pemberhentian sementara, yakni ketika seorang anggota DPR menjadi terdakwa perkara tindak pidana dengan ancaman minimal lima tahun penjara atau kasus khusus seperti korupsi dan terorisme.

Sementara itu, Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Dr Indaru Setyo Nurprojo mengatakan bahwa penonaktifan anggota DPR RI merupakan mekanisme internal partai, bukan ketentuan yang secara jelas diatur dalam undang-undang.

"Logika dasarnya, keanggotaan seseorang di legislatif bermula dari keputusan partai politik. Mekanisme penonaktifan ini sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) setiap partai," katanya di Purwokerto, dilansir antara, Senin (1/9/2025).

Ia mengatakan penonaktifan ini biasanya dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, seperti merugikan nama partai atau kepentingan partai. "Meskipun istilah penonaktifan tidak selalu jelas, mekanismenya ada. Kasus-kasus yang ada sekarang, saya pikir lebih ke konteks merugikan nama dan kepentingan partai," katanya menjelaskan.

Menurut dia, penonaktifan anggota dewan tidak menutup kemungkinan akan berujung pada proses PAW. Ia mengatakan jika seorang anggota dinonaktifkan tanpa

batas waktu yang jelas, secara otomatis harus ada penggantinya.

"Kalau saya membacanya begitu. Dengan sendirinya, karena enggak jelas sampai batas waktu penonaktifannya sampai kapan, berarti mau enggak mau harus ada penggantinya, PAW-nya," katanya menegaskan.

Ia pun membandingkan dengan kasus Fahri Hamzah yang dinonaktifkan dari partainya pada tahun 2016, namun tetap menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI karena tidak bisa serta-merta dicabut melalui mekanisme internal partai.

Menurut dia, fenomena penonaktifan anggota legislatif oleh partai bisa dipahami sebagai cerminan dinamika politik internal maupun upaya partai menjaga citra dan kepentingan organisasinya.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan lima anggota DPR yang berstatus nonaktif tetap menerima gaji dan tunjangan. Hal itu disampaikannya menanggapi polemik sejumlah partai politik yang menonaktifkan kader mereka di parlemen.

Menurut Said, baik tata tertib DPR maupun Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak mengenal istilah nonaktif. "Namun saya menghormati keputusan yang diambil oleh NasDem, PAN, dan Golkar. Seharusnya pertanyaan itu dikembalikan kepada ketiga partai tersebut, supaya moralitas saya tidak melangkahi itu. Dan memang tidak boleh lah ya," kata Said, dilansir bisnis, Senin (1/9/2025).

Said mengakui secara teknis anggaran untuk gaji anggota DPR tetap berjalan. "Kalau dari sisi aspek itu ya

terima gaji. Iya lah, karena sebagaimana saya sampaikan tadi," ujarnya.

Setali tiga uang, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari, membenarkan penjelasan tersebut. Menurutnya, status nonaktif tidak berdampak pada hak keuangan anggota DPR karena istilah itu tidak diatur dalam UU MD3.

Dengan demikian, meskipun secara politik kader tertentu dinonaktifkan partainya, secara hukum dan administrasi mereka tetap berstatus anggota DPR dengan hak penuh, termasuk gaji dan tunjangan.

"Ya, karena istilah nonaktif itu tidak dikenal dengan Undang-Undang MD3 sehingga tidak bermakna nonaktif itu diberhentikan. Tentu saja kalau tidak diberhentikan, segala haknya sebagai anggota masih akan mereka dapatkan," kata Feri dilansir bisnis. (han,ist,ant/lut)



Dari sisi hukum, mereka tetap berstatus anggota DPR sampai ada PAW. Penggantian antarwaktu bisa dilakukan setelah ada pemberhentian antarwaktu yang disampaikan pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR,"

**TITI
ANGGRAINI**

Dosen Hukum Tata Negara UI

UB DAN HOKKAIDO UNIVERSITY GELAR LEARNING SATELLITE DI PPP PONDOKDADAP



MALANG - Universitas Brawijaya (UB) bersama Hokkaido University Jepang menggelar kegiatan Learning Satellite di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap, Kabupaten Malang, Selasa (19/8/2025). Kegiatan ini bertujuan memberi pengalaman langsung kepada

mahasiswa mengenai tata kelola pelabuhan perikanan berbasis tuna.

Mahasiswa program sarjana dan pascasarjana dari kedua universitas didampingi tim dosen dalam kunjungan tersebut. Mereka mengikuti pengenalan lapang dengan meninjau fasilitas pelabuhan, kapal perikanan, hingga aktivitas pendaratan dan distribusi

ikan. Peserta tampak antusias menanyakan operasional pelabuhan, mulai dari jenis alat tangkap, jumlah kapal, hingga komoditas yang didaratkan.

Selain tur lapangan, kegiatan juga diisi dengan sesi kelas yang menghadirkan Kepala UPT PPP Pondokdadap, Budi Setyono, S.Pi, M.Agr. Ia memaparkan sejarah,

fasilitas, layanan operasional, hingga potensi pengembangan pelabuhan ke depan. Mahasiswa aktif berdiskusi, termasuk mengenai pembagian hasil usaha serta pengawasan hasil tangkapan ikan.

Kegiatan Learning Satellite ditutup dengan foto bersama di depan gedung administrasi PPP Pondokdadap.(adv)

KEJAR PENGAKUAN ALIRAN DANA JUAL-BELI KUOTA HAJI, YAQUT DIPERIKSA LAGI

Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kembali diperiksa KPK. Dia dicecar soal pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 pada 2024 dari Arah Saudi ke Pemerintah Indonesia, yang dituangkan melalui SK Menag yang diterbitkannya.

Penyidik Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK) masih menganalisis bukti, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag).

Berdasarkan SK Menteri Agama tertanggal 15 Januari 2024, kuota tambahan itu dibagi rata: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Keputusan tersebut dinilai menabrakaturan.

"Keputusan menteri dilakukan plotting atau pembagian kuota haji khusus dan juga kuota haji reguler. Jadi hasil-muasalnya didalami oleh penyidik, sehingga kemudian dilakukan plotting 50%-50% itu

seperti apa," kata Jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media mengungkapkan materi pemeriksaan penyidik terhadap Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2025).

Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan aliran dana terkait praktik jual beli kuota haji. Setoran yang diberikan perusahaan travel kepada pejabat Kemenag disebut berkisar antara 2.600–7.000 dolar AS per kuota, atau sekitar Rp41,9 juta hingga Rp113 juta per kuota dengan kurs Rp16.144,45, sebagai commitment fee pembagian kuota.

"Dan juga terkait dengan dugaan-dugaan aliran uang dari pembagian kuota haji tersebut itu juga didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan hari ini," ujar Budi.

Diteriaki 'Maling' oleh Massa

Usai pemeriksaan, Yaqut disoraki ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

Mereka saat itu tengah menggelar aksi mendesak KPK segera menangkap dan menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api di DJKA Kemenhub.

"Woo... woo... woo..." teriak warga bersahut-sahutan.

Massa kemudian juga meneriaki Yaqut dengan sebutan maling. Menurut mereka, dugaan korupsi yang menyeret Yaqut sama dengan Sudewo. "Bajingan! Bajingan! Maling! Maling!" teriak warga Pati.

Sebelumnya, Yaqut rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Senin (1/9/2025) sore. Ia diperiksa selama hampir tujuh jam, tercatat masuk pukul 09.22 WIB dan keluar pukul 16.19 WIB.

Usai diperiksa, Yaqut menyebut dirinya dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Kementerian

Agama (Kemenag). Ia mengatakan pemeriksaan kali ini untuk memperdalam keterangan yang pernah disampaikan pada tahap penyelidikan.

"Ya memperdalam keterangan yang saya sampaikan di keterangan sebelumnya. Di penyelidikan. Jadi ada pendalaman," ucap Yaqut kepada awak media. Dia mengaku mendapat 18 pertanyaan dari penyidik. "Insyallah kalau saya tidak salah ada 18," katanya.

Namun, Yaqut enggan menjawab pertanyaan media mengenai dugaan praktik jual beli kuota haji antara pejabat Kemenag dan biro travel.

"Materi (pemeriksaan) tolong tanyakan kepada penyidik," ujarnya.

Ia juga memilih bungkam saat ditanya soal kabar adanya surat perintah penyidikan (sprindik) yang menyebut dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka. Yaqut langsung meninggalkan lokasi tanpa memberi penjelasan.(wid,ini,ist/dya)

BEDA KLAIM WARGA PATI DAN KPK SOAL PENONAKTIFAN BUPATI

Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi damai di halaman gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (1/9/2025). Mereka menuntut tindak lanjut pengusutan dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Pati Sudewo. Warga klaim KPK akan menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan bupati, namun hal itu langsung ditepis. Pasalnya, komisi anti-rasuah tak memiliki kewenangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diklaim menerbitkan surat rekomendasi supaya pemerintah menonaktifkan Sudewo alias Sudewo sebagai Bupati Pati. Beleid ini akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun surat tersebut diduga berkaitan dengan status Sudewo dalam kasus suap pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hal ini disampaikan Supriyono alias Botok selaku koordinator aksi lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang melakukan audiensi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Senin (1/8/9/2025). Mereka beraksi setelah menumpang tujuh bus dan ada 350 warga yang hadir.

"Intinya dari audiensi tersebut KPK akan berkoordinasi hari ini untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati Pati Sudewo," kata Supriyono kepada wartawan di lokasi.

Supriyono mengatakan warga Pati menunggu surat itu diterbitkan. Mereka juga akan mendapat salinannya.

"Hasilnya kita disuruh menunggu ya, untuk jamnya belum ada, belum ada kepastian. Yang intinya dari KPK akan berkoordinasi secara internal Untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati Pati Sudewo," tegasnya.

Lebih lanjut, Supriyono menyebut warga Pati mendesak komisi antirasuah segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka kasus suap DJKA Kemenhub. Sebab, KPK dituding masuk angin karena status hukum politikus Partai Gerindra itu belum jelas.

"Tidak boleh KPK seperti itu. Tadi saya sampaikan, kalau KPK tidak tegak lurus, jangan salahkan masyarakat Pati akan marah," tegasnya.

"Jangan salahkan Pati akan membakar. Kemarin tanggal 13. Saya sudah mereda masyarakat Pati. Pendopo kabupaten mau dibakar, saya yang mereda. DPR mau dibakar, saya yang mereda," sambung Supriyono.

Namun di sisi lain, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penerbitan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati, Sudewo bukan kewenangan KPK.

"Surat itu kan bukan kewenangan



Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Senin (1/9/2025). (Ist)

KPK terkait penonaktifan jabatan seorang kepala daerah. Fokus KPK adalah terkait dengan penanganan perkaranya," tegas Budi kepada wartawan, Senin (1/9/2025).

Budi mengatakan sampai saat ini KPK sedang mendalami dugaan keterlibatan korupsi Sudewo dalam proyek pembangunan wilayah Jawa Tengah/Solo Balapannan, di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Menurut aturan, bupati dapat diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri setelah ada usulan dari DPRD melalui rapat paripurna dan diputus oleh Mahkamah Agung (MA) bahwa bupati telah terbukti melanggar ketentuan, termasuk menjadi terdakwa tindak pidana atau melanggar sumpah jabatan. Mekanisme ini merupakan bagian dari sistem kontrol dan pengawasan yang memastikan kekuasaan kepala daerah dibatasi.(wid,ant,tmo/dya)

POIN-POIN KASUS PROYEK DJKA

Keterlibatan Bupati Pati Sudewo

- Namanya disebut dalam sidang kasus korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
- Diduga menerima aliran dana (commitment fee) dari rekanan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.

Aliran Dana Suap

- Total dugaan suap yang diterima mencapai Rp 720 juta.
- Selain itu, saat penggeledahan rumah, KPK menyita uang tunai sekitar Rp 3 miliar dalam rupiah dan valuta asing.

Status Hukum

- Sudewo masih berstatus saksi, namun pemeriksaan oleh KPK terus mendalami perannya.
- KPK menegaskan pengembalian uang (jika dilakukan) tidak menghapus unsur pidana.

Pastikan Penyidikan Berlanjut

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menemui perwakilan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memastikan penyidikan terkait Bupati Pati Sudewo (SDW) masih berproses.

"Kami pastikan kepada Bapak, Ibu, dan seluruh rekan-rekan masyarakat Pati bahwa penyidikan perkara tersebut masih berproses. Jadi, kami pastikan penyidikan perkara tersebut tidak berhenti," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat berbicara kepada warga Pati di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Selain itu, Budi menjelaskan penyidikan perkara dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang menyeret Sudewo saat menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024, masih berproses karena membutuhkan kecermatan.

"Butuh kecermatan dalam melakukan pendalaman maupun

pengumpulan barang bukti, sehingga kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum termasuk dalam perkara tersebut dapat dilakukan secara profesional dan taat terhadap asas-asas hukum," katanya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan apabila warga Pati mempunyai sejumlah informasi tambahan terkait perkara dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, maka dapat menyampaikannya kepada KPK.

"Kami sangat terbuka untuk menerima saran, masukan, atau informasi apa pun yang dapat mendukung penanganan perkara tersebut. Terlebih, Gedung KPK adalah gedung rakyat yang selalu terbuka untuk seluruh masyarakat di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly berharap warga Pati dapat kembali ke daerahnya setelah menyampaikan aspirasi mengenai Sudewo.

"Seperti yang sudah disampaikan dari KPK bahwa perkara terhadap Bupati SDW tadi sudah berproses. Untuk itu kami harapkan dari seluruh warga Pati yang ada di depan kami ini, apabila sudah selesai penyampaian aspirasinya, maka kami mohon dengan sangat untuk kembali ke Pati dengan tertib," kata Lilipaly.

Ia melanjutkan, "Jangan kita menyusahkan orang lain atau menyusahkan diri kita sendiri. Yang penting aspirasi kita sudah didengar dan kita menunggu hasil kerja dari pihak KPK."

Nama Sudewo sempat muncul pada sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, pada 9 November 2023.(wid,ant,ist/dya)

OKUPANSI HOTEL DI KOTA MALANG ANJLOK, KINI HANYA 10 PERSEN

MALANG - Situasi tidak kondusif dalam beberapa hari terakhir berimbas ke sektor perhotelan dan restoran di Kota Malang. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agoes Basoeki, mengungkapkan okupansi kamar hotel yang biasanya mencapai 40-70 bahkan 80 persen, kini hanya sekitar 10 persen.

"Yang jelas, dari kejadian beberapa hari ini, menurut laporan dari teman-teman omzetnya jadi menurun, hancur," kata Agoes, Senin (1/9/2025).

Ditambahkannya, beberapa hotel yang berada di pusat Kota Malang merasakan dampak paling nyata. Tingkat keterisian yang pada hari biasa relatif tinggi, kini jauh merosot hingga hanya tersisa sebagian kecil.

"Beberapa hotel yang ada di tengah kota biasanya juga full terus, sekarang tinggal 10 persen keterisiannya mulai dengan hari ini," jelasnya.

Menurut Agoes, suasana mencekam membuat sejumlah pelaku usaha hotel dan restoran juga memilih

menutup sementara kegiatan. Meski begitu, PHRI mengimbau agar tetap beroperasi seperti biasa karena rencana aksi demonstrasi bukan ditujukan kepada sektor usaha tersebut.

Dikatakannya, aparat keamanan juga telah bersiaga di sejumlah titik untuk mengantisipasi kerawanan. Karena itu, PHRI menekankan agar operasional usaha tetap berjalan.

"Sehingga memang banyak pengusaha memilih tutup sementara, tapi kami dari PHRI sarankan untuk tetap jalan dan beroperasi seperti biasa. Sebab, sasarannya kan bukan kita melainkan DPR. Dan sepertinya aparat dan pemerintah sudah mengantisipasi," terangnya.

Selain keterisian kamar yang anjlok, banyak kegiatan di hotel juga dibatalkan, termasuk agenda dari instansi pemerintahan. Hal ini semakin menekan pendapatan pelaku usaha.

"Kemarin weekend tamu masih menginap, acara masih jalan, tapi

mulai hari ini ada info dari beberapa hotel, banyak tamu dari pemerintahan yang membatalkan kegiatan meeting," tutur Agoes.

Dampak kondisi ini juga dirasakan sektor pariwisata secara umum. Sejumlah wisatawan, menurut laporan PHRI, menunda atau membatalkan kunjungan mereka ke Kota Malang karena mempertimbangkan faktor keamanan dan kesehatan.

"Memang kan pariwisata, khususnya hotel dan resto kan memerlukan suasana yang kondusif. Jika ada sedikit permasalahan yang membuat mereka kurang nyaman dan aman tentu berdampak," tambahnya.

PHRI Kota Malang berharap situasi



Suasana Koridor Kayutangan Heritage nampak sepi dari biasanya, Senin (1/9/2025). (Santi/Lentera)

segera pulih. Agoes mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat dan mahasiswa, untuk menjaga kondusivitas kota demi mendukung keberlangsungan sektor pariwisata. (Santi/Dya)

MASIH ADA 150 GURU DI KOTA BATU BERSTATUS HONORER



(Ilustrasi) Guru dan siswa melakukan kegiatan belajar mengajar. (dok.ist/kemendikdasmen.go.id)

BATU - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Batu mengatakan masih ada 150 guru berstatus honorer yaitu Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Pihaknya berkomitmen memperjuangkan agar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Bagi kami saat ini yang urgent, ya bagaimana nasib teman-teman honorer, yakni GTT dan PTT bisa diangkat P3K paruh waktu tahun ini. Kami mencatat ada sekitar 150 guru

honorer di sekolah negeri di Kota Batu yang perlu diperjuangkan. Sedangkan untuk di sekolah swasta masih dilakukan pendataan," ujar Ketua PGRI Kota Batu, Budi Prasetyo, dikutip pada Senin (1/9/2025).

Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah masa depan guru honorer. Menurutnya, tahun ini disebut sebagai batas waktu bagi GTT dan PTT untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

"Di dalam pengurusan yang baru, saat ini kami terus berupaya dan memperjuangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Batu. Khususnya mengawal teman-teman guru agar semakin bermartabat dan kompeten," jelasnya.

Selain persoalan GTT dan PTT, PGRI Kota Batu juga menyoroti aturan baru Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Dalam regulasi terbaru, Budi menyebut, penggunaan dana BOSDA untuk honorarium di sekolah negeri dibatasi maksimal

hanya 20 persen. Berbeda dengan sekolah swasta yang dapat menggunakan hingga 40 persen.

"Dengan adanya batasan tersebut sangat berdampak di beberapa sekolah. Sehingga sekolah tidak cukup untuk membayar GTT dan PTT yang ada. Nah atas masalah tersebut kami mintakan solusi ke Dinas. Masak honor GTT dan PTT yang masih belum layak harus dikurangi lagi," ungkap Budi.

Ia mencontohkan kondisi di SMPN 3 Kota Batu, di mana terdapat 13 GTT dan PTT. Menurutnya, kebutuhan honorarium untuk 13 guru tersebut mencapai 27 persen dari BOS reguler setiap bulannya.

"Dengan adanya pemangkasan menjadi 20 persen tersebut secara tidak langsung pembayaran honor bagi GTT dan PTT kurang. Kalau dulu ada BOSDA tidak masalah, tapi sekarang BOSDA tidak bisa digunakan untuk itu," paparnya.

Tak hanya soal honorarium, menurutnya, sekolah negeri di Kota Batu juga menghadapi kendala pembayaran honor pengajar ekstrakurikuler (ekskul) serta pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang hingga kini belum cair.

"Sampai sekarang sudah kita tanyakan ke dinas. Memang beliau (Kepala Dinas Pendidikan)

menyampaikan bahwa tengah berproses. Contohnya untuk pembina ekstrakurikuler yang masih uji coba untuk pencairan honor, sedangkan ATK informasinya bulan depan akan dicairkan," terang Budi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, M. Chori, memastikan pencairan BOSDA tahun 2025 untuk sekolah negeri mulai berjalan. Namun, dirinya juga mengakui pencairan tersebut sempat tersendat sejak Januari hingga Agustus 2025.

Menurut Chori, tahun ini merupakan pertama kalinya regulasi baru BOSDA diterapkan, sehingga mekanisme pencairan dilakukan lebih hati-hati dan bertahap. "Karena ini pertama kali, perlu ada validasi ketat agar sesuai aturan. Setelah prototipe berjalan lancar, maka proses di sekolah lain akan lebih cepat," katanya.

Sementara itu, pencairan honorarium guru ekstrakurikuler disebut masih dalam proses. Chori menyebut baru satu sekolah yang pencairannya sudah diajukan dan ditandatangani, yaitu SDN Gunungsari 1.

"Honor ekstra saat ini masih proses. Saya sudah tandatangani honor ekstrakurikuler untuk SDN Gunungsari 1. Sekarang masih proses validasi dan verifikasi," jelasnya. (Santi/Dya)



Presiden Donald Trump menari setelah berpidato di Macomb Community College, Selasa, 29 April 2025, di Warren, Michigan. (Foto: AP)

Presiden Donald Trump kembali menekankan bahwa kebijakan tarif memegang peran krusial dalam menjaga kestabilan perekonomian Amerika Serikat.

Dikutip dari Truth Social pada Senin (1/9/2025), Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan "benar-benar runtuh" jika tidak memperoleh "triliunan dolar" pendapatan dari tarif impor yang masuk ke kas negara.

Pernyataan ini muncul hanya beberapa hari setelah pengadilan banding federal memutuskan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya ketika menggunakan kekuasaan darurat untuk memberlakukan tarif baru terhadap barang impor.

Putusan tersebut menjadi pukulan terhadap strategi perdagangan Trump, yang menjadikan tarif sebagai salah satu pilar utama kebijakan ekonominya.

Meskipun menyatakan Trump melampaui kewenangan, pengadilan mengizinkan tarif tetap berlaku hingga pertengahan Oktober. Jaksa Agung Pam Bondi mengonfirmasi bahwa Departemen Kehakiman akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung guna mempertahankan

kebijakan tersebut.

Secara akumulatif, hingga 28 Agustus 2025, total penerimaan tarif mencapai US\$183,1 miliar pada tahun fiskal berjalan. Dengan tren saat ini, AS berpotensi mengumpulkan penerimaan tarif setara dengan total tahun sebelumnya hanya dalam waktu 4-5 bulan.

Fokus Pengurangan Utang

Sementara itu, Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan bahwa sebagian penerimaan tarif dapat

TANPA PEMASUKAN TARIF IMPOR, TRUMP AKUI AS RUNTUH

diarahkan untuk mengurangi utang nasional, yang kini mendekati US\$37,2 triliun per 18 Agustus.

"Saya pikir pada titik tertentu kita akan mampu melakukannya," ujar Bessent dalam wawancara dengan CNBC pada 19 Agustus. Ia menambahkan bahwa dirinya dan Presiden Trump "sangat fokus untuk membayar utang."

Menurut Bessent, kebijakan ini juga diharapkan dapat menurunkan rasio defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia bahkan menyebutkan proyeksi penerimaan tarif tahun ini kemungkinan besar akan direvisi naik dari perkiraan awal US\$300 miliar, meski tidak memberikan angka pasti, hanya menegaskan jumlahnya akan "jauh lebih tinggi."

Sementara itu, utang AS yang terus membengkak memicu perdebatan klasik di Washington mengenai pengeluaran pemerintah,

perpajakan, dan langkah-langkah pengendalian defisit.

Bagi Trump, tarif bukan sekadar instrumen perdagangan, melainkan juga sumber utama pemasukan negara yang dapat dipakai untuk memperkuat perekonomian sekaligus menekan utang. Namun, kritik menyebut kebijakan ini justru berisiko meningkatkan harga barang impor dan membebani konsumen domestik. (Truth Social, The Times, ist/nei)

LEMBAGA PENYIARAN INTERNASIONAL AMERIKA SERIKAT YANG TERDAMPAK KEBIJAKAN PHK MASSAL MELIPUTI:

1. Voice of America (VOA)
2. Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)
3. Radio Free Asia (RFA)
4. Middle East Broadcasting Networks (MBN) – termasuk Alhurra TV dan Radio Sawa
5. Office of Cuba Broadcasting (OCB) termasuk Radio y Televisión Martí

LEBIH DARI 500 PEGAWAI VOA DIPECAT

LEBIH dari 500 karyawan di lembaga penyiaran internasional Amerika Serikat, termasuk Voice of America (VOA) dan sejumlah media lain yang dibiayai pemerintah, akan mengalami pemutusan hubungan kerja. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh pejabat dalam pemerintahan Presiden Donald Trump.

Kari Lake, penjabat CEO United States Agency for Global Media (USAGM), pada Sabtu (30/8/2025) menyampaikan lewat media sosial X bahwa lembaga tersebut sedang melakukan pengurangan pegawai tetap berskala besar.

"USAGM telah memulai apa yang dikenal sebagai reduction in force (RIF) terhadap sejumlah besar pegawai federal penuh waktu," tulis Lake dalam pernyataan tertanggal 29 Agustus 2025. "Saya berencana melanjutkan langkah-langkah tambahan dalam beberapa bulan ke depan untuk memperbaiki lembaga yang sangat bermasalah ini, sekaligus memastikan suara

Amerika tetap terdengar di luar negeri di tempat yang paling penting."

Langkah ini dilakukan meski seorang hakim federal sebelumnya memutuskan bahwa Lake tidak bisa memecat Michael Abramowitz dari posisi direktur VOA, karena pemecatan itu dianggap jelas bertentangan dengan hukum.

Hakim Distrik AS Royce Lamberth juga memutuskan bahwa pemerintahan Trump belum menunjukkan kepatuhan terhadap perintah pengadilan untuk mengembalikan operasi VOA seperti semula. Pada Senin (1/9/2025), hakim memberi "satu kesempatan terakhir, sebelum sidang penghinaan pengadilan" untuk mematuhi aturan, dan memerintahkan Lake hadir dalam pemeriksaan hukum paling lambat 15 September.

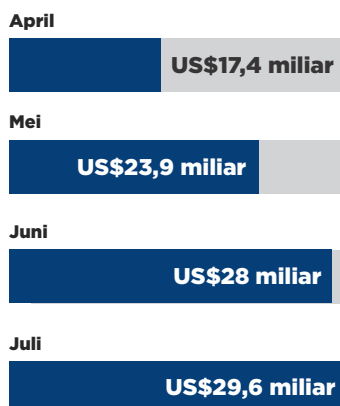
Sekelompok pegawai lembaga yang menggugat rencana pembubaran VOA mengecam langkah terbaru Lake. "Kami

menganggap serangan Lake terhadap lembaga ini sangat menjijikkan," kata mereka dalam pernyataan. "Kami menantikan pemeriksaannya nanti untuk mengetahui apakah rencananya membongkar VOA benar-benar melalui proses ketat yang diwajibkan Kongres."

Diketahui sejak Januari, ketika Trump kembali menjabat, ia langsung memerintahkan pemangkasan besar-besaran. Dana federal untuk Voice of America ditarik, dan operasionalnya dipangkas sampai batas minimum yang masih diperbolehkan Kongres.

Gelombang PHK terbaru ini, yang akan mempengaruhi 532 pegawai, disebut sebagai bagian dari upaya menjalankan instruksi Trump "untuk memangkas birokrasi federal, meningkatkan layanan lembaga, dan menghemat lebih banyak uang rakyat." (Deutsche Welle (DW), ist/nei)

DATA TERBARU PENERIMAAN TARIF AS



Tak Hanya Lezat, Ini Khasiat Bibimbap bagi Kesehatan

Tidak hanya musik dan drama, kuliner Korea Selatan juga sukses menarik minat masyarakat Indonesia. Saat ini, berbagai hidangan khas Negeri Ginseng sudah bisa dengan mudah ditemui di Tanah Air tanpa harus berkunjung langsung ke Korea.

Salah satu kuliner khas Korea Selatan yang banyak digemari adalah Bibimbap. Hidangan nasi campur dengan beragam sayuran dan minyak perilla ini tidak hanya lezat, tetapi juga dikenal kaya manfaat bagi kesehatan.

Dari berbagai variasinya, sanchae bibimbap atau bibimbap sayuran liar kini semakin populer. Rasanya segar dengan aroma khas sayuran pegunungan, sekaligus kaya manfaat untuk kesehatan.

Selain bahan umum seperti daun lobak kering (siraegi), batang ubi jalar, cabai hijau, hingga irisan labu kering, sanchae bibimbap juga menggunakan aneka sayuran pegunungan. Beberapa di antaranya jamur, paku-pakuan, daun gosari (royal fern), deodeok, akar balloon flower, hingga gondre (wild thistle). Biasanya bahan-bahan ini dibumbui lalu dicampur bersama nasi.

Para ahli menyebut bahwa hidangan ini juga bisa membantu mengontrol gula darah, menjaga kesehatan tulang, hingga mendukung manajemen berat badan, asalkan dimakan dengan cara yang benar.

Lantas seberapa sehatkah hidangan ini? Yuk,

simak manfaatnya bibimbap berikut ini dikutip dari The Korea Times.

Siraegi bantu kontrol gula darah

Siraegi atau daun lobak kering mengandung serat tiga hingga empat kali lebih banyak dibanding daun segar. Serat ini membantu gula darah lebih stabil dan membuat perut kenyang lebih lama, sehingga baik untuk menjaga berat badan.

Daun lobak juga kaya vitamin C, kalsium, kalium, dan folat. Bahkan kandungan kalsiumnya bisa sepuluh kali lebih tinggi dibanding umbinya. Menurut National Institute of Crop Science, daun lobak juga mengandung senyawa indoles dan isothiocyanates yang bersifat antikanker. Ditambah vitamin D, kalsium dalam daun lobak berperan penting untuk memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis.

Zucchini kaya vitamin A

Zucchini Korea atau aehobak, tinggi vitamin A yang penting untuk kesehatan mata, kulit, dan perkembangan sel. Kekurangan vitamin A bisa menyebabkan kulit kering, kasar, hingga gangguan pada mata.

Meski aman dimakan banyak, suplemen vitamin A perlu hati-hati. Jika berlebihan, justru bisa menimbulkan efek samping seperti sakit kepala, mual, kulit kering, hingga rambut rontok.

Jamur tinggi

protein

Jamur mengandung protein dan serat yang baik untuk otot, imun tubuh, serta menurunkan kolesterol. Khusus jamur shiitake, kandungan vitamin B1 dan B2 lebih tinggi dibanding kebanyakan sayuran, serta kaya ergosterol yang bisa berubah menjadi vitamin D dan membantu mengontrol kolesterol.

Konsumsi shiitake kering yang dianjurkan sekitar 10 gram per hari, setara dengan hanya 3 kalori, sehingga ramah untuk diet penurunan berat badan. Jamur juga mengandung asam amino esensial yang hanya bisa diperoleh dari makanan. Selain itu, senyawa lentinan dalam jamur shiitake dikembangkan sebagai obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menghambat pertumbuhan sel kanker.

Perhatikan nasi

Bibimbap sebaiknya dibuat dengan beras multigrain yang berindeks glikemik rendah, sehingga tidak langsung melonjakkan gula darah. Meski begitu, nasi tetaplah karbohidrat. Jika porsi berlebihan, tetap bisa menyebabkan kenaikan gula darah dan berat badan.

Karena itu, dalam bibimbap, sebaiknya porsi sayuran lebih banyak dibanding nasinya. Untuk penderita diabetes atau pradiabetes, nasi multigrain dalam jumlah sedang lebih dianjurkan. Kalau hanya ada nasi putih, porsi perlu dikurangi dan fokus pada topping sayuran agar tetap sehat.

Sayuran

Sayuran yang biasa dipadukan bersama bibimbap adalah wortel, bayam, jamur, tauge dan sayuran lain disesuaikan dengan selera masing-masing. Sayuran yang berwarna-warni mengandung zat gizi yang sangat baik bagi tubuh. Sayuran berwarna orange seperti wortel kaya akan kandungan beta karoten, vitamin A, pottasium dan antioksidan.

Sedangkan bayam mengandung folat yang dapat membantu mencegah terjadinya neural tube disorders (NTD) selama kehamilan. Kandungan vitamin K, A dan magnesium yang tinggi pada bayam juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Antioksidan, polifenol dan flavonoid

juga terkandung pada tauge yang menjadi salah satu komponen dalam bibimbap.

Gochujang

Bumbu fermentasi yang umumnya digunakan adalah gochujang. Gochujang merupakan produk fermentasi yang terbuat dari bubuk cabai merah, beras ketan, meju (kedelai fermentasi) dan garam. Proses fermentasi gochujang tidak hanya meningkatkan rasa dan aroma yang khas dan unik namun juga meningkatkan nilai gizinya. Gochujang mengandung berbagai komponen bioaktif yang dapat memberikan efek antioksidan.

Cara Menyajikan

Bibimbap dapat dikreasikan dan dimodifikasi menjadi hidangan yang lebih sehat. Berikut tips membuat bibimbap sehat di rumah tanpa mengurangi lezatannya:

Pilihan Nasi

Nasi yang memiliki pigmen warna alami seperti nasi merah dan nasi cokelat memiliki kandungan antioksidan dan serat yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasi putih. Nasi merah mengandung zat besi yang dapat mencegah terjadinya anemia defisiensi besi. Kandungan gizi dalam nasi cokelat juga tidak kalah jika dibandingkan dengan nasi merah. Nasi cokelat mengandung antioksidan dan vitamin E yang dapat memberikan proteksi terhadap penyakit kronik.

Mengolah Protein dan Sayur

Selain di tumis, sayur juga dapat diolah dengan cara direbus atau dikukus. Namun, proses pemasakan yang terlalu lama dapat merusak kandungan gizi dan tekstur bahan makanan, sehingga waktu pemasakan juga perlu diperhatikan. Sayuran seperti bayam membutuhkan waktu rebus sekitar 3-5 menit, sedangkan sayuran yang lebih keras seperti wortel dan brokoli membutuhkan waktu yang lebih lama sekitar 7-10 menit.

Beberapa sayuran juga dapat disantap secara mentah seperti mentimun tetapi tetap harus memperhatikan kebersihannya. Pastikan sayuran sudah dicuci dengan bersih sebelum dikonsumsi (nei,ist/dya)



Ilmuwan Ciptakan Katak Albino dari Rekayasa Genetik

Sekelompok peneliti melakukan percobaan unik terhadap katak tebu (*Rhinella marina*), spesies invasif yang dikenal merusak ekosistem di Australia, dengan menghasilkan varian albino melalui rekayasa genetik CRISPR-Cas9. Studi ini dirancang untuk memperdalam pemahaman mengenai albinisme pada satwa liar.

Selama ini, hewan albino dianggap jarang ditemui di alam liar karena warna tubuhnya yang mencolok membuat mereka lebih mudah menjadi sasaran predator. Pandangan ini telah lama diyakini sebagai alasan utama rendahnya populasi hewan albino di habitat aslinya.

Namun, riset terbaru dari tim peneliti Macquarie University, Australia, mengungkapkan bahwa albinisme tidak hanya sebatas soal

kerentanan terhadap predator. Faktor lain seperti gangguan penglihatan, pertumbuhan lebih lambat, hingga tingkat kelangsungan hidup yang lebih rendah juga berperan penting dalam menjelaskan mengapa hewan albino sulit bertahan di alam liar.

"Kami sedang meneliti metode genetik untuk pengendalian katak tebu, dan pada awalnya kami menciptakan katak albino sebagai bukti konsep. Saat memelihara katak tersebut, kami memperhatikan bahwa mereka tampak tumbuh lebih lambat dan tingkat kelangsungan hidupnya lebih rendah dibandingkan dengan saudara mereka yang berpigmen, yang kemudian menginspirasi studi ini." Kata Alex Funk, penulis utama riset dan ilmuwan dari School of Natural Sciences di Macquarie University

Hasil studi yang dipublikasikan di jurnal *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* mengungkapkan bahwa katak albino memiliki berbagai keterbatasan

dibandingkan saudara pigmennya. Mereka tidak hanya tumbuh lebih lambat dan memiliki tingkat kelangsungan hidup lebih rendah, tetapi juga menunjukkan gangguan penglihatan yang cukup signifikan. Temuan ini memberi gambaran baru mengenai tantangan fisiologis yang dialami hewan albino di alam liar.

Dalam pengamatan para peneliti, katak albino membutuhkan cahaya yang lebih terang untuk dapat berburu dengan efektif. Mereka sering kali gagal menangkap mangsa, sehingga harus menghabiskan energi lebih banyak untuk mendapatkan makanan. Kondisi ini membuat kemampuan bertahan hidupnya semakin

tertekan dibanding katak berpigmen normal.

Masalah tersebut semakin serius karena katak tebu termasuk spesies yang aktif pada malam hari. Dengan keterbatasan penglihatan, katak albino menjadi jauh kurang kompetitif di habitat alamnya, bahkan tanpa kehadiran predator. Hal ini menunjukkan bahwa faktor fisiologis internal bisa sama pentingnya, atau bahkan lebih berpengaruh, dibandingkan ancaman eksternal dalam menentukan kelangsungan hidup hewan albino. (nei,ist/dya)



Pejantan dan betina katak tebu (*Rhinella marina*) albino hasil rekayasa genetik. Foto: Etienne Littlefair via *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

TREN AKSESORIS 2025

Dari Bogo Bag hingga Jam Tangan Retro

Apakah kamu senang melengkapi gaya sehari-hari dengan aksesoris? Pada 2025, aksesoris tidak lagi sekadar tambahan, melainkan menjadi bagian penting untuk menunjukkan kepribadian sekaligus mencerminkan suasana hati.

Dengan pilihan yang tepat, aksesoris mampu memberikan sentuhan akhir yang mempercantik penampilan. Lebih dari itu, detail kecil ini juga memperkuat karakter gaya berpakaian, menjadikan setiap outfit terasa lebih personal dan berkesan.

Dilansir dari Glamour UK, tren aksesoris tahun ini tampil semakin beragam dan unik. Mulai dari sentuhan logam artistik, jam tangan bergaya vintage, hingga tas dengan nuansa bohemian yang hangat. Aksesoris kini hadir lebih personal, tidak hanya mengikuti tren semata, tapi juga menjadi medium untuk menunjukkan sisi diri yang otentik dan berani tampil beda.

Jam Tangan Kecil Bergaya Klasik

Jam tangan mungil dengan desain rantai logam atau strap kulit retro kini tengah menjadi favorit baru di dunia fashion. Ukurannya yang kecil memberi kesan manis, sementara detail rantai atau kulit retro menambahkan karakter klasik yang tetap relevan untuk tren masa kini. Aksesoris ini pas bagi kamu yang ingin tampil anggun tanpa perlu banyak usaha.

Menariknya, jam tangan ini mudah dipadukan dengan berbagai gaya, mulai dari outfit kasual hingga semi-

formal. Dipakai bersama kemeja oversized atau blazer, penampilanmu akan langsung terasa lebih rapi sekaligus chic. Kesan throwback yang dibawanya menghadirkan nuansa unik yang jarang dimiliki jam tangan modern.

Kacamata Statement Berbentuk Futuristik

Kacamata besar ala serangga hingga model sport lens super sleek menjadi highlight mencolok di runway musim semi 2025. Bentuknya yang unik dan penuh statement memberi kesan futuristik sekaligus bold, menjadikannya aksesoris yang langsung menarik perhatian. Tak heran, tren ini cepat diadopsi oleh para pecinta fashion yang senang bereksperimen dengan tampilan berbeda.

Aksen kacamata ini juga cocok untuk kamu yang ingin tampil edgy tanpa banyak usaha. Dipadukan dengan outfit basic seperti kaus polos, jeans, atau blazer simpel, keseluruhan look bisa langsung berubah menjadi lebih modis.

Lebih dari sekadar aksesoris, kacamata statement ini menjadi simbol keberanian dalam bergaya. Mereka yang mengenakannya seolah menunjukkan kepercayaan diri untuk tampil standout di tengah keramaian.

Tas Boho Bernuansa Earthy

Tas berbahan suede dengan nuansa warna tanah dan detail anyaman kembali menjadi pusat perhatian di dunia fashion. Terinspirasi dari era '70-

an yang identik dengan gaya bohemian, tas ini menghadirkan kombinasi antara kesan klasik dan sentuhan modern yang membuatnya terasa relevan untuk gaya masa kini. Teksturnya yang khas juga memberi nilai estetika yang berbeda dibandingkan tas berbahan lainnya.

Saat dipadukan dengan dress flowy, blouse putih, atau jeans santai, tas suede dan anyaman ini mampu menciptakan tampilan effortless chic yang natural sekaligus elegan. Gaya sederhana pun langsung terlihat lebih menawan berkat detail tas yang unik. Kehadiran tas ini menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin tampil fashionable tanpa terlihat berlebihan.

Perhiasan Skulptural Unik

Gelang tebal, anting dengan bentuk tak biasa, hingga cincin besar ala patung kini tengah menjadi favorit para stylist. Kehadiran aksesoris ini mampu menghadirkan sentuhan artsy sekaligus futuristik, menjadikan tampilan lebih berkarakter.

Cocok untuk kamu yang suka tampil beda, aksesoris bold ini bisa memberikan statement kuat meski hanya dipadukan dengan busana simpel. Hasilnya, gaya sehari-hari pun terlihat lebih unik, modern, dan penuh ekspresi personal.

Medicine Bag Multifungsi

Tas model satchel dan bowling dengan desain roomy serta fungsional kembali naik daun sebagai tren yang banyak digemari. Kapasitasnya yang luas membuat tas ini praktis untuk

menyimpan berbagai barang, sekaligus tetap menjaga tampilan agar terlihat fashionable dan modern.

Dipakai dengan cara dijinjing di bawah lengan ala model runway, tas ini mampu memberi sentuhan chic dan effortless. Bahkan gaya simpel sehari-hari bisa langsung terlihat lebih stylish hanya dengan tambahan aksesoris praktis namun tetap elegan ini.

Aksesoris Laut

Kalung kerang, liontin mutiara, hingga tas jaring kembali jadi pilihan favorit bagi pecinta gaya coastal dan tropical look. Aksesoris ini menghadirkan nuansa segar dan natural yang pas untuk melengkapi gaya musim panas maupun suasana santai.

Tak hanya cocok dipakai saat liburan ke pantai, item bernuansa laut ini juga tetap manis dipadukan dengan outfit putih atau pastel. Hasilnya, gaya harianmu terlihat effortless sekaligus memancarkan vibe summer yang chic dan menawan.

Perhiasan Campuran Emas dan Perak

Perhiasan dua warna kini jadi pilihan stylish untuk kamu yang ingin tampil trendi. Kalung dan cincin dengan kombinasi emas serta perak memberikan sentuhan berani sekaligus modern, sehingga mudah menarik perhatian. Aksen kontras ini juga cocok dipadukan dengan gaya layering, membuat tampilan lebih dinamis dan unik. Dengan perhiasan dua warna, kamu bisa tampil beda dari biasanya. (nei,ist/dya)



Riza Chalid ...dari hal 1

Salah satu warga net yang menyatakan dukungan pada Presiden Prabowo adalah TheNdons @Ndons_Back yang ada di X. Dalam unggahan pada 31 Agustus, akun ini memberikan surat terbuka pada Presiden Prabowo.

"Dear Mr. President, Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia beras. Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia minyak goreng. Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia migas. Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar mafia Reza Chalid dan anak2 dan kroni2nya. Bahkan mereka bersama orang2 itu mencuri kekayaan Negara," tulisnya.

Unggahan akun itupun masih berlanjut yang dengan tegas menyebutkan bahwa "Tidak pernah ada pendahulu melawan korupsi di BUMN. Tidak pernah ada pendahulu yg pernah berbicara soal tantiem yang nilainya triliunan setiap tahun, malah semua partai2 yang pernah berkuasa mereka semua menikmati korupsi di BUMN".

"Tidak pernah ada orang2 pintar yg skrg bersuara, sok berada dibarisan rakyat membuka semua masalah2 di BUMN padahal mereka pernah berada di dalam BUMN. Kenapa disaat semua itu Bapak buka dan mulai bersih-bersih, semakin Bapak yang diserang? Kami bersama mu Bapak, Rakyat bersama mu!" pungkasnya.

Kemudian, akun X, ruhulmaani @ruhulnakgaul pada Senin (1/9/2025) juga mengunggah pernyataan yang mengatakan dugaan Riza Chalid ikut andil dalam kerusuhan yang terjadi. "Konon katanya, Riza Chalid ini mafia yang mendanai kerusuhan kemarin. Yha sebetulnya agak masuk akal juga sih. Duitnya banyak," tulisnya.

Namun demikian dia juga mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. "Tapi yang jadi pertanyaan, masak iya pemerintah kalah sama Riza Chalid? Kok lemah sekali aparat hukum, dalam hal ini Kejaksaan, menghadapi mafia migas ini. Padahal kan Kejaksaan udah di-backup tentara. Masak iya, masih gak berani menangkap. Mustahil sekali negara dengan segala sumber daya senjata yang ada, kalah sama mafia. Aku menduga, ini bukan masalah ketidakmampuan atau ketidakberanian. Tapi masalah "keberpihakan". Lihat saja Silfester. Masih melenggang bebas gak ditangkap Kejaksaan, tuh," tulisnya.

Dukungan terhadap Presiden Prabowo juga datang dari akun X, Lira (official) @Naz_lira yang diunggah pada 30 Agustus 2025. "Cukup dan sudahi kekacauan ini pak Presiden Prabowo. Semua kini tergantung pada keputusan Bapak Presiden, mau kemana Bapak Presiden melanjutkan

arah perjalanan negeri ini," tulisnya.

"Cukup sudah nyawa rakyat menjadi korban, banyak dari mereka adalah putra-putri, pemuda pemudi, tunas bangsa yang akan melanjutkan generasi bangsa ini, jangan ada lagi lagi nyawa putra-putri, pemuda pemudi yang dijadikan tumbal esok untuk sekedar mempertahankan Dinasti Si Raja Dusta, Fufufafa dan para ternak-nya," sambung unggahan itu.

Dan selanjutnya dia meminta pada Presiden segera mengambil keputusan untuk menghentikan kerusuhan. "Ambil segera keputusan untuk menghentikan kerusuhan ini berlanjut, yang menumpahkan darah anak-anak kami, nyawa adik-adik kami, dan meluluhkan lantakan seluruh pelosok negeri ini, demi menjamin keselamatan orang-orang yang menghancurkannya," pungkasnya.

Presiden Prabowo juga mendapatkan dukungan dari sederet menteri. Salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam akun Instagram pribadinya, Trenggono menyebut bahwa tidak pernah ada pendahulu yang berani melawan mafia migas, termasuk mafia Riza Chalid serta kroninya.

"Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia migas. Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar mafia Riza Chalid dan anak-anak dan kroni-kroninya. Bahkan mereka bersama orang-orang itu mencuri kekayaan negara," tulisnya dikutip CNBC Indonesia, Senin (1/9/2025).

Trenggono juga menyebut aksi Prabowo dalam melawan korupsi di BUMN dan membahas tantiem bernilai triliunan rupiah. "Kenapa di saat semua itu Bapak buka dan mulai bersih-bersih, semakin Bapak yang diserang."

Tulisan yang serupa juga diunggah oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding. "Hari ini, ketika Bapak Prabowo mulai membuka, memberikan, dan membersihkan, justru serangan semakin deras datang kepada beliau. Karena setiap upaya pemberantasan selalu melahirkan perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan," ungkapnya.

"Sebagai Menteri, saya berdiri bersama Presiden Republik Indonesia. Tugas kami adalah memastikan agenda 'bersih-bersih' ini terus berjalan, bukan mundur karena tekanan," katanya.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat ditanya mengenai andil Riza Chalid dalam kericuhan aksi massa yang di antaranya ada pembakaran dan penjarahan menyebut Polri bergerak sesuai bukti-bukti yang dikumpulkan di lapangan.

"Ya tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di

lapangan. Kita akan menarik dari fakta yang kita dapat, akan kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari tahu," kata Listyo di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9/2025) sore.

Sejauh ini, Kapolri menyebut ada beberapa orang yang dicurigai sebagai perusuh telah ditangkap. "Sudah lumayan banyak, tetapi belum kami himpun ada beberapa yang sudah ditangkap. Namun, karena masih terus bertambah, nanti akan kami informasikan secara resmi," sambung Listyo Sigit.

Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo Subianto menyebut kericuhan yang ditandai dengan aksi membakar dan menjarah sebagai kejadian terencana. Presiden juga menyebut ada anasir-anasir yang menggerakkan aksi-aksi tersebut.

"Menghadapi anasir-anasir, kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi, hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang, tapi ada ketentuannya demonstrasinya harus damai, harus sesuai undang-undang, jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izin harus dikasih dan berhentinya jam 18.00," katanya.

Presiden kemudian menilai aksi massa di Makassar, yang membakar gedung DPRD, bukan kegiatan menyampaikan aspirasi, yang dilindungi oleh undang-undang. Prabowo menilai aksi itu sebagai tindakan makar.

"Inget di Sulawesi Selatan, empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik korban, gedung DPRD dibakar. Ini tindakan-tindakan makar. Ini bukan penyampaian aspirasi ya. Jadi, semua aparat negara akan selidiki siapa bertanggung jawab. Saya menduga kita sudah ada indikasi, dan kita tidak akan ragu. Saya tidak akan ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun akan saya hadapi atas nama rakyat," kata Presiden Prabowo.

Terkait dengan Riza Chalid, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan Riza Chalid sebagai DPO sejak 19 Agustus 2025 lalu karena tak datang setelah dipanggil Kejagung lebih dari 3 kali. "Sudah (DPO) per 19 Agustus 2025," ungkap Anang kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (1/9/2025).

Pada 10 Juli 2025, Kejagung menetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.

Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Qohar menjelaskan, Riza Chalid diduga terlibat dengan

tersangka HB, Tersangka AN dan Tersangka GRJ untuk menyepakati kerjasama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina.

"Memasukkan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM Merak, yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan Stok BBM," ujarnya di gedung Kejaksaan Agung, Kamis malam (10/7/2025) dilansir cnbcindonesia.

Riza Chalid merupakan pemilik PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan diduga menghilangkan skema kepemilikan aset dalam kontrak kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) serta menetapkan harga kontrak yang tinggi. Kontrak dengan PT OTM ini sebenarnya berlaku selama 10 tahun dan PT OTM menjadi milik PT Pertamina Patra Niaga.

"Klausul itu di dalam kontrak dihilangkan, padahal berdasarkan hasil kajian Pranata UI itu sudah jelas apabila selama 10 tahun dengan harga yang saya sebut tadi, ada klausul Pertamina akan mendapat sharing asset, aset akan menjadi milik PT Pertamina Patra Niaga, tetapi itu dihilangkan," tuturnya.

Atas tindakan tersebut, BPK menghitung kerugiannya mencapai Rp 2,9 triliun. "Kerugian berdasarkan perhitungan BPK sebanyak Rp 2,9 triliun, khusus untuk OTM dengan hitungan total loss," imbuhnya.

Qohar total kerugian keuangan dan perekonomian negara dalam perkara ini sebesar Rp 285 triliun.

Terkait dengan DPO, Kejagung pernah menduga Riza Chalid berada di Singapura. Namun, Pemerintah Singapura memastikan bahwa Riza Chalid tidak berada di wilayah mereka.

Belakangan, Riza Chalid diduga berada di Malaysia. Pemerintah Malaysia menyatakan tidak akan memberikan perlindungan hukum kepada Riza Chalid. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Mohamad Alamin, pada Senin (1/9/2025), dalam sidang parlemen negara tersebut.

Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas pertanyaan Anggota Parlemen Malaysia, Wan Ahmad Fayhsal Ahmad Kamal, yang menyinggung informasi mengenai keberadaan Riza Chalid di Malaysia. Dalam forum tersebut, Wan Ahmad Fayhsal juga menyampaikan bahwa Riza Chalid diduga telah menikah dengan salah satu keturunan keluarga kerajaan Malaysia.

Kemudian, Wakil Menteri Luar Negeri Datuk Mohamad Alamin menegaskan bahwa posisi pemerintah Malaysia tetap konsisten dalam penegakan hukum. "Bapak Perdana Menteri telah menjawab soal Riza adalah masalah perundangan dan kita tidak berikan perlindungan," tegasnya. (han,ant,ist/lut)

BUNTUT KERUSUHAN, 15 POLDA AMANKAN 3.195 ORANG

Terkait dengan aksi di beberapa kota yang terjadi sejak 25 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2025, Mabes Polri merilis rincian pengamanan terhadap massa aksi unjuk rasa yang mengamankan sebanyak 3.195 orang. Dari jumlah itu, 55 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengamanan tersebut dilakukan di 15 Polda di wilayah Indonesia. "Ini data sementara yang terhimpun, 3.195 orang yang diamankan di 15 Polda di wilayah Indonesia," kata Trunoyudo di Jakarta, Senin (1/9/2025).

kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengamanan tersebut dilakukan di 15 Polda di wilayah Indonesia. "Ini data sementara yang terhimpun, 3.195 orang yang diamankan di 15 Polda di wilayah Indonesia," kata Trunoyudo di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Seperti yang telah diketahui aksi demo yang terjadi di beberapa kota di Indonesia yang berakhir bentrok, ricuh, hingga pengrusakan fasilitas



Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (tengah) saat konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Senin (1/9/2025). (Antara)

umum. Diantaranya terjadi di Jakarta, yang merusak fasilitas umum seperti Halte TransJakarta. Selain itu, mereka juga menjarah rumah pejabat negara seperti rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbach. Bahkan, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat menjadisasaran.

Di Makassar, terjadi pembakaran gedung DPRD setempat, kejadian ini juga menyebabkan 4 orang ASN tewas. Sedangkan di Bandung, massa membakar Mess MPR dan merusak banyak fasilitas umum.

Sedangkan di Surabaya, aksi yang terjadi pada Jumat (29/8/2025) sore di depan Gedung Negara Grahadi, massa membakar sedikitnya 25 motor yang diparkir di bagian timur area Grahadi. Pada malam hari, polisi berhasil menggeser massa dari depan Grahadi, hingga akhirnya massa menyebar ke beberapa daerah. Malam itu, massa merusak sedikitnya 9 pos polisi dan satu kantor polsek.

Kemudian pada Sabtu (30/8/2025), aksi kembali terjadi di depan Gedung Negara Grahadi. Kali ini mereka membakar ruang kerja Wakil Gubernur Jatim, dan juga satu ruangan Biro Umum. Selain itu, mereka juga menjarah barang-barang yang ada di pressroom.

Di Kota Kediri, aksi massa juga membakar DPRD setempat. Selain itu juga merusak kantor Bupati Kediri. Sedangkan di Solo (Surakarta) terjadi pembakaran Sekretariat DPRD kota (Setwan) oleh massa yang semula berkumpul secara damai. Di Yogyakarta, mereka membakar mobil, merusak pagar, hingga papan nama Polda, menyebabkan kemacetan

parah.

Sementara aksi yang terjadi di Semarang diwarnai dengan pelemparan bom molotov dan pembakaran kendaraan dan fasilitas publik. Aksi massa juga terjadi di Medan, Jambi, Pontianak, Aceh, Gorontalo yang merusak pos polisi, membakar fasilitas umum, dan bentrok dengan aparat.

"Sebanyak 387 orang telah dipulangkan, 55 orang telah ditetapkan tersangka, 2.753 dalam tahap pemeriksaan," ucap Trunojoyo.

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengatakan bahwa akan menangkap para pelaku-pelaku membuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan. "Sudah ada yang kami tangkap," katanya Senin (1/9/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengambil langkah tegas menghadapi aksi anarkis yang terjadi di sejumlah daerah.

"Arahan Presiden jelas, khusus untuk tindakan-tindakan anarkis, TNI dan Polri diminta mengambil langkah tegas sesuai dengan undang-undang," kata Kapolri.

Ia juga menekankan bahwa langkah penegakan hukum akan dilakukan secara terukur untuk memastikan ketertiban kembali terjaga.

"Semua ini demi kepentingan masyarakat luas dan menjaga stabilitas nasional," ucapnya dilansir antara.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan Presiden Prabowo Subianto sudah menugaskan Kapolri

dan Panglima TNI untuk mengambil tindak tegas terhadap kegiatan pelanggaran hukum, salah satunya penjarahan rumah milik pejabat.

"Dengan memperhatikan faktor keamanan, baik individu pribadi, dan pejabat, dan institusi negara, beliau telah menugaskan kepada kapolri dan panglima untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah terukur terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran penegakan hukum," kata Sjafrie di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (31/8/2025) dilansir Liputan6.com.(han,ant,ist/lut)



Dengan memperhatikan faktor keamanan, baik individu pribadi, dan pejabat, dan institusi negara, beliau telah menugaskan kepada kapolri dan panglima untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah terukur terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran penegakan hukum,"

**SJAFRIE
SJAMSOEDDIN**
Menteri Pertahanan RI

BERIKUT RINCIAN PENANGKAPAN DI 15 POLDA:

1. **Polda Metro Jaya:** 1.240 orang
2. **Polda Jatim:** 709 orang, 173 telah dipulangkan, 485 dalam tahap pemeriksaan, dan 51 ditetapkan tersangka
3. **Polda Jateng:** 653 orang dalam tahap pemeriksaan
4. **Polda Jabar:** 147 orang, 23 telah dipulangkan, 124 dalam tahap pemeriksaan
5. **Polda Bali:** 138 orang, 38 telah dipulangkan, 100 dalam tahap pemeriksaan
6. **Polda Kalbar:** 91 orang, 86 telah dipulangkan, 5 dalam tahap pemeriksaan
7. **Polda Sumsel:** 63 orang dalam tahap pemeriksaan
8. **Polda DIY:** 60 orang dalam tahap pemeriksaan
9. **Polda Sumut:** 50 orang, 48 telah dipulangkan, 2 dalam tahap pemeriksaan karena positif narkoba
10. **Polda Jambi:** 17 orang telah dipulangkan
11. **Polda Banten:** 15 orang dalam tahap pemeriksaan
12. **Polda Sulbar:** 6 orang dalam tahap pemeriksaan
13. **Polda Papua Barat Daya:** 4 orang ditetapkan tersangka
14. **Polda Sulteng:** 1 orang telah dipulangkan
15. **Polda NTB:** 1 orang telah dipulangkan.